



MEWUJUDKAN PRAJURIT TNI HEBAT DAN PROFESIONAL

Oleh : H. Obsatar Sinaga, S.I.P., M.Si.

Abstrak

Tulisan ini bermaksud untuk memberikan analisis yang jelas dan tegas bagaimana sebuah makna profesionalisme diterapkan. Penekanan kontekstual dalam pembahasan tulisan ini tentang TNI memberikan penjelasan bagaimana seharusnya TNI difungsikan dalam konteks ketatanegaraan kita. Pembahasannya berkaitan dengan dari mana sebuah institusi TNI lahir dan bagaimana seharusnya kekuatan (kehebatan) TNI bisa dipertahankan dengan tidak pernah memisahkannya dari asalnya, yaitu rakyat Indonesia. Tulisan ini kemudian mengambil kesimpulan bahwa kendati sulit untuk mengembalikan fungsi TNI dalam kehidupan bermasyarakat sipil, namun kenyataannya dibutuhkan peran sebagai benchmark kepemimpinan untuk menyelesaikan berbagai kendala cultural yang selama ini terjadi di negeri ini. Masalah besar seperti radikalisme dan gerakan terorisme juga tidak tuntas diselesaikan tanpa melibatkan peran TNI. Bahkan terkadang TNI hanya berfungsi sebagai pemadam kebakaran dalam persoalan sosial kemasyarakatan. Untuk itu dibutuhkan sebuah mekanisme atau sistem baru yang mampu mengakomodir peran sosial TNI sebagai ejawantah dari keinginan kita mewujudkan TNI yang profesional dan hebat dengan tidak memisahkannya dari cikal bakalnya, yakni rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Profesionalisme, radikalisme, mekanisme baru dan TNI yang hebat.

Abstract

This paper intends to provide a clear and clear analysis of how a professional meaning is applied. The contextual emphasis in this paper on the TNI provides an explanation of how the TNI should function within the context of our constitution. The discussion relates to where a TNI institution was born and how should the TNI's strength be maintained by never separating it from its origin, that is, the people of Indonesia. This paper then concludes that although it is difficult to reproduce TNI functions in civil society life, the reality is that it takes role as a leadership benchmark to solve various cultural constraints that have been happening in this country. Major issues such as radicalism and terrorism movements are also not resolved solely without involving the role of the TNI. In fact, sometimes the TNI only serves as a firefighter in social issues. Therefore, a new mechanism or system capable of accommodating the TNI's social role as a manifestation of our desire to realize a professional and great TNI by not separating it from its embryo, the people of Indonesia.

Keywords: Professionalism, radicalism, new mechanism and great TNI.

Bila ada pepatah sederhana yang menyebutkan bahwa “the professional is someone who never mixed job and pleasure,” maka benar adanya bila seorang profesional digambarkan dalam bentuk yang demikian menguasai pekerjaannya, memahami sampai pada titik nadir, bekerja dengan sepenuh hati dan bahkan kurang menghiraukan situasi di sekitarnya ketika sedang sibuk bekerja. Bagi pemahaman ini orientasi seorang profesional biasanya diidentikan dengan *workaholic* (gila bekerja)

Karakter profesional yang demikian ini memberikan simulasi berpikir bahwa seorang yang professional dianalogikan dengan seorang yang berpakaian rapih, berdasi, berpenampilan sempurna dan menggunakan kartu pengenal yang tergantung di saku pakaianya.

Longman (1987) menyebutkan etimologi profesional yang didasari oleh kata profesi, yang mengandung pengertian sikap, pribadi yang memiliki keahlian tertentu sebagai kebutuhan. Profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualiti dari seseorang yang profesional (Longman, 1987). Dengan demikian profesionalisme (*profesionalisme*) ialah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal daripada profesi yang bermakna berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya (KBBI, 1994).

Kalaudemikianhalnya, profesionalisme itu mengembalikan jati diri kepada asal muasalnya, mengembalikan pada keahliannya yang mendasar dan

menempatkan jati diri itu justru pada karakter dasarnya. Profesionalisme dianggap sebagai sebuah faham yang melekat pada diri atau lembaga yang dinilai mampu melakukan fungsi secara spesifik dan tepat guna. Bila perseonifikasi menyentuh pada seseorang, maka diyakini orang tersebut ibarat dewa yang memang dilahirkan dan datang dari keluarga yang mampu dan menguasai pekerjaan yang ditekuninya. Demikian pula bila menyangkut lembaga, maka dianggap lembaga tersebut merupakan institusi yang memang bergelut dalam fungsi yang karakternya penuh dengan kedekatan dan kealamian dengan asal muasalnya. Ketika kita menyebut FBI, misalnya, maka yang terbayang oleh kita adalah sebuah institusi yang asal muasalnya dari Amerika Serikat, menguasai intelijen dunia dan bahkan secara alami pemikiran kita akan membenarkan kalau lembaga itu profesional.

Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga memiliki gambaran yang tidak jauh berbeda dengan kesan pemikiran profesional. Setidaknya, lembaga ini akan dibayangkan sebagai lembaga yang memiliki SOP jelas, pola kerja yang jelas dan terarah, serta memiliki sejarah panjang yang berasal dari rakyat. Yang terakhir disebutkan itu mempunyai makna yang dalam dan sangat berarti bagi lembaga TNI kita. Bahkan analoginya setara bila disebutkan bahwa FBI berasal dari Amerika Serikat, maka TNI berasal dari rakyat Indonesia.

Pakar militer internasional, Samuel Finer, dalam bukunya *The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics*, menuturkan apa yang membuat militer berbeda karena didalamnya ada budaya yang sangat otokratik, tuntutan

loyalitas dan komitmen penuh. Militer memiliki organisasi yang solid, unggul, kokoh dan bekerja seefektif mungkin. Dengan demikian, militer siap menunjukkan kinerja profesionalnya kapan saja negara membutuhkan. Dalam pemikiran Finer ini terlihat bahwa profesionalisme hanya digambarkan sebagai perilaku positif yang menyangkut pada pekerjaan yang dilakukan oleh individu militer dalam lembaga ketentaraan. Gambaran tersebut belum mencerminkan dari mana asal dari sebuah lembaga sehingga dia harus bisa profesional. Sebab ukuran profesional itu juga menyangkut dari mana lembaga tersebut diakui sebagai lembaga yang efektif dalam melaksanakan tugasnya.

Bagi kebanyakan negara berkembang, fungsi militer tersebut berada dalam jarak yang tidak terpisahkan dengan kondisi kehidupan rakyatnya. Di Jepang, misalnya, militer yang dimaksud adalah tentara bela diri Jepang. Tentara bela diri ini datang dari keahlian yang memang mendominasi dalam kehidupan masyarakat Jepang. Seni bela diri merupakan tata kehidupan yang menjadi bagian penting bagi rakyat Jepang. Kondisi sejarah hubungan Jepang dengan Amerika dan negara negara besar membuat Negeri Sakura itu tidak memiliki pasukan militer seperti layaknya di negara lain. sekali lagi kita melihat kondisi sejarah dan pola kehidupan rakyat Jepang. Thailand juga bisa menjadi contoh lainnya, di mana negeri ini dalam catatan sejarah selalu menjadi *buffer state* dalam pertempuran dua negara atau lebih di perbatasan wilayahnya. Kondisi sejarah tersebut memungkinkan bagi Thailand untuk tidak terlalu menonjolkan fungsi militer bagi kepentingan *outward looking* tetapi justru *inward looking* dalam

penyelesaian situasi domestik. Namun dua contoh di Jepang dan Thailand tersebut menunjukkan bagaimana peran sejarah mewarnai kehidupan berbangsa sehingga sistem ketatanegaraannya relatif stabil. Memang terdapat perbedaan yang tajam di mana Jepang tidak melibatkan pasukan bela dirinya dalam sistem politik, dibandingkan dengan Thailand. Lagi lagi yang harus dijelaskan adalah karena sejarahnya yang berbeda sehingga memaknakan maksimalisasi tugas yang berbeda.

Figur leadership.

Apakah kita tidak melihat bagaimana perbedaan yang tajam ketika militer sedang mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan sipil (*civil position*) dengan segala kondisi yang regulasinya jelas ditegakkan dengan menggunakan *standart operating procedure*, sehingga segala sesuatu berjalan sesuai aturan dan perintah. Barangkali praktek instruksional tersebut dirasakan tidak begitu nyaman bagi sebagian kalangan yang biasa berjaya dalam keberadaan yang ireguler. Namun kepastian hukum, kondisi keteraturan, penerapan sistem yang lebih bersih dan berwibawa serta keberadaan figure pimpinan yang selalu “pantas dan layak” untuk dijadikan contoh bagi masyarakat umum, merupakan prasyarat berjalannya *good governance* dalam sistem ketatanegaraan kita. Dulu tidak kita temukan antrian mengurus kartu tanda penduduk, tidak juga antrian mengurus passport, atau bahkan antrian imigrasi, namun sekarang semua serba antri, pelayanan yang diberikan tidak memenuhi standar, bahkan tindakan arogan sektoral dari lembaga yang seharusnya melayani masyarakat secara bersahaja.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, misalnya, juga memberikan bukti bahwa tidak terdapat pola kepemimpinan yang bisa dijadikan panutan. Jaksa menangkap tersangka dengan caranya sendiri, sementara mereka tidak diajarkan prosedur menangkap tersangka yang benar dan beradab. Sehingga orientasi penangkapannya lebih didasari oleh popularitas tindakan. Belum lagi, polisi yang bertindak menangkap penjahat seperti sedang *action* dalam sebuah adegan film laga, atau aksi kepahlawan Rambo dalam tindakan melawan kezholiman, justru ketika tindakan menangkap penjahat didampingi oleh wartawan televisi. Tak pelak lagi, banyak "bintang-bintang" baru dalam jajaran aparat penegak hukum kita. Orientasinya bukan lagi tugas yang sukses untuk lembaga tetapi kepiawaian di depan kamera (seperti Kombes Krisna Mukti ketika beraksi melawan teroris) atau bahkan berdialektika dengan wartawan. Contoh ini menjadi tandatanda bahwa kepemimpinan dalam jabatan publik membutuhkan figur yang bisa dijadikan panutan dengan doktrin pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Banyak kalangan pengamat politik dan organisasi memberikan penilaian bahwa sampai sejauh ini sistem kaderisasi dan pembinaan organisasi yang terbaik di Indonesia masih dipegang oleh institusi TNI. Seorang prajurit TNI yang berpangkat perwira menengah (Kolonel) misalnya, sudah pasti pernah menjalani pendidikan penjenjangan mulai dari kursus kejuruan, Sekolah Staf dan Komando bahkan berbagai proses lainnya. Selain itu, seorang berpangkat bintang satu pun dapat dipastikan sudah menjalani Sesko TNI (Sesko Gab), atau bahkan lemhanas untuk

jabatan strategis tertentu. Hal ini menunjukkan prakondisi kematangan intelektual, kematangan emosional dan bekal pendidikan penjenjangan serta pengalaman jabatan sebelumnya, merupakan stimulasi bagi figur kepemimpinan yang dihasilkan dalam organisasi yang memiliki sistem terbaik ini.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak sedikit pengaruh yang terjadi dalam kepemimpinan militer yang melekat dalam masyarakat. Sebagai contohnya adalah adanya sejumlah Ormas yang kemudian membentuk format pasukan inti yang menyerupai militer dengan warna uniform berbeda dan berwarna warni. Bahkan organisasi dengan orientasi keagamaan sekalipun, seperti Nahdlatul Ulama (NU) juga memiliki pasukan inti bernama Banser NU, yang berpakaian serba militer styling. Apalagi organisasi berazaskan nasionalisme, baik berupa Ormas maupun organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP). Kepercayaan dengan gaya kepemimpinan militer tersebut merupakan bukti bahwa rakyat begitu percaya dan meyakini bahwa figur kepemimpinan TNI masih mendapat tempat yang istimewa dalam hati masyarakat Indonesia. Artinya, rakyat menganggap TNI adalah jati dirinya. Lantas, bagaimana negeri ini bisa memanfaatkan keyakinan kebanyakan masyarakat tersebut?

Pemadam kebakaran

Mengapa sub judul ini menyebut pemadam kebakaran? Sesungguhnya sebutan ini merupakan gambaran adanya fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Betapa tidak, fenomena ini menggambarkan seringnya

terjadi masalah baru kemudian kekuatan TNI digunakan sebagai pemadam kebakaran dari masalah tersebut, padahal sebelumnya TNI tidak dilibatkan untuk menangani ketika dalam suasana damai. Fenomena pemadam kebakaran saat ini terjadi dalam konteks munculnya gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Kasus yang disebutkan tersebut belakangan ini malah lebih menggejala dengan makin maraknya gerakan yang mengatasnamakan kebenaran agama untuk kepentingan kelompoknya dalam melakukan serangan dan menakut-nakuti (*terrere-- fragten*) kelompok target.

Dalam penanganan kasus Santoso, misalnya, TNI dilibatkan setelah dirasakan sulit menghadapi gerakan kaum radikal ini. Bahkan penanganan teroris dengan tindakan tembak mati yang belakangan dilakukan pihak kepolisian sejak era Jenderal Tito Karnavian menjadi kepala BNPT, justru melahirkan sikap dendam dan pembalasan (*revenge*) yang membabi buta dari gerakan radikalisme itu. Langkah tepat presiden Joko Widodo kemudian dengan melibatkan TNI untuk menangani terorisme dan radikalisme serta dengan menghadirkan revitalisasi semangat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi simbol dari kembalinya peran TNI sebagai pemadam kebakaran.

Bagi TNI, pada garis ini tidak menjadi soal apakah diposisikan sebagai pemadam kebakaran atau tidak, namun posisinya sebagai prajurit profesional malahan mengembalikannya dalam peran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti dikemukakan di awal tulisan ini, bahwa TNI akan menjadi kuat bila dekat dengan rakyat, TNI akan menjadi profesional

bila dikembalikan dari asal muasalnya, sehingga pada tataran ini TNI justru tampil sebagai prajurit yang profesional di tengah-tengah rakyat. Kalau Jenderal Sudirman pernah mengatakan bahwa posisi terbaik bagi seorang Sudirman adalah di tengah-tengah prajurit, maka wajar bila kita menyebut proposisi bahwa posisi terbaik bagi prajurit TNI adalah di tengah-tengah rakyat.

Sejarah pembentukan TNI adalah berasal dari rakyat, sehingga kekuatan dasarnya justru menjadi komponen bangsa ini yang dekat dengan rakyat. Bila asumsi tersebut kita benarkan, maka posisi terlemah dari prajurit TNI justru berada terpisah atau bahkan jauh dari rakyatnya. Tidak berlebihan apabila disebutkan bahwa TNI dan rakyat itu sejati, maka dengan demikian diyakini pula bahwa rakyat juga tidak akan kuat bila jiwanya tidak berjalan seiring dengannya. Fenomena ini saat ini terbukti, dimana rakyat begitu mudah terkena interference dari berbagai informasi negatif, mulai dari isu SARA, info Hoax, pengaruh negatif perkembangan narkoba, bahkan penularan radikalisme. Kalau demikian halnya, rakyat juga membutuhkan kekuatan dasarnya berupa TNI, seperti halnya TNI membutuhkan perangkat cikal bakalnya berupa rakyat Indonesia.

Catatan akhir

Rupanya, kita tidak membutuhkan definisi profesionalisme seperti letter luck yang ditampilkan oleh teori Barat dalam pemahamannya. Profesionalisme prajurit TNI justru ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya di barak atau tangsi militer. Kehebatan dan profesionalisme terletak pada kekuatan

dasarnya, dan TNI kekuatan dasarnya adalah bersatu dengan rakyat. Makna ini tentu saja akan menimbulkan sikap prejudice dari kelompok tertentu yang anti pada doktrin karya kekaryaan TNI. Sudah waktunya kita mencari bentuk (formulasi baru) bagi posisi kebersamaan rakyat dan TNI ini.

Sudah waktunya kita memikirkan agar rakyat tidak lagi mudah dipengaruhi oleh ajaran radikalisme yang akhirnya memecah belah bangsa ini. Sebab terbukti rakyat yang terpisah dengan jati dirinya (TNI) justru mudah terpengaruh faham radikal yang melahirkan terorisme. RT Jangham, pakar teroris India menyebut bahwa rakyat yang jauh dari semangat kebangsaan, akan mudah dipengaruhi faham radikal. Semangat kebangsaan dimaksud bagi rakyat Indonesia justru muncul dari kedekatan rakyat dengan TNI nya.

Sudah saatnya tulisan ini menyimpulkan bahwa kita harus mengembalikan jati diri rakyat Indonesia dengan cara mendekatkannya dengan TNI. Dan sudah waktunya kita mengembalikan kehebatan dan profesionalisme TNI dengan mengembalikannya pada induknya, yakni rakyat Indonesia. Anda pasti berpikiran sama dengan penulis, ingin rakyat ini secara holistik mencintai Pancasila, tidak radikal apalagi menjadi teroris, maka jawabnya: kembalikan jati diri TNI nya. Anda Ingin TNI professional dan hebat, kembalikan dia ke asal muasalnya, cikal bakalnya, yakni: rakyat Indonesia. Sejak itu, bangsa ini pasti akan menjadi bangsa yang kuat, hebat dan Berjaya.

Daftar Pustaka

1. Khan Kurshid, *the fight against terrorism "international terrorism"*, 2001
2. Longman Dictionary (1987), *Meaning of professionalism*
3. Maeda, Tetsuo, David J. Kenney (ed. and intro.), and Steven Karpa (trans.). *The Hidden Army: The Untold Story of Japan's Military Forces*. Chicago: edition q, 1995.
4. R.T. Jangam, *Political Sociology*, Oxford Press, 1980
5. The World Today; Bhutan and Sikkim: Two Buffer States Vol. 15, No. 12. Royal Institute of International Affairs. 1959. pp. 492–500.
6. *The Man on Horseback: the role of the military in politics* by FinerS. E.LondonPall Mall Press, 1962. Pp. ix + 268. 27s. 6d.

BIODATA PENULIS



Prof.Dr. H. Obsatar Sinaga, S.I.P., M.Si., tempat tanggal lahir: Deli Serdang, 17 April 1969; Pendidikan Umum: S-1 Ilmu Hub. Internasional FISIP Unpad (1995), S-2 Ilmu Sosial (Administrasi Publik) Unpad (2005), S-3 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan konsentrasi Administrasi Unpad (2009); Riwayat Kepangkatan : Penata Muda III/a 2000, Penata Muda Tingkat I III/b 2002, Penata III/c 2004, Penata Tingkat I III/d 2006, Pembina IV/a 2008, Pembina Tingkat I IV/b 2014, Pembina Utama IV/c 2016; Jabatan: Ketua KNPI Bandung 1997-2000, Pemimpin Perusahaan Harian Umum “Bandung Pos” sampai 2004, Koordinator Persatuan Orang Tua Mahasiswa Komisariat Fak. Ilmu Sospol Unpad 2007, Wakil Ketua Pengda PSSI Jabar 2007-2011, Wakil Ketua I Panca Marga Jawa Barat 2007-2011, Sekretariat Umum Ormas MKGR Jawa Barat 2010, Ketua BPK KONI Jabar 2006-2010, Ketua I KONI Jabar 2010-2014, Dewan Pakar ICMI Bidang Pertahanan, Sekretaris Bidang Kajian Politik Internasional ICMI, Dosen Non Organik Seskoad dan Seskoau, Asesor Nasional Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Sekretaris Program Pasca Sarjana (Master dan Doktoral) Studi Hubungan Internasional FISIP Unpad, Wakil Ketua Majelis Wali Amanah Unpad, Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Widyatama Bandung.